

Majalah Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek

FORWAS

CERMIN

INTEGRITAS

BANGSA

MERDEKA

BELAJAR

Merdeka Belajar

Kampus Merdeka



0856-4209



ITJEN

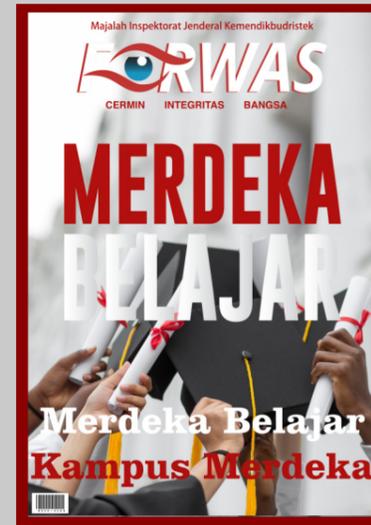


DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU

Kampus Merdeka

INDONESIA JAYA



SUSUNAN REDAKSI

Pelindung: Dr. Chatarina Muliana (Irjen Kemendikbudristek)

Penanggung Jawab: Purwaniati (Plt. Ses Itjen Kemendikbudristek)

Pimpinan Redaksi: Purwaniati

Dewan Redaksi: Masrul Latief, Sutoyo, Subiyantoro, Muhaswad, Lindung Saut Maruli

Redaktur Pelaksana: Muhammad Ihsan

Sekretaris Redaksi: Romanti Sawitri

Redaktur: Rindias Fatmasari, Melody

Staf Redaksi: Nehru

Fotografer: Ikram

Layout: Nehru

Teknologi Informasi: Aco

Infografis: Nehru

Surel Redaksi: forwas.itjen@kemdikbud.go.id

Alamat Redaksi:

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Gedung B,

Jl. Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270 Kotak POS JKT 12044;

Telp (021) 5737104, 5737138

Daftar Isi

Editorial

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Peluang dan Hambatan Pelaksananya pada Perguruan Tinggi **4**

Alternatif Pengganti Skripsi, Tesis, dan Disertasi dalam Meningkatkan Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia **5**

Upaya Itjen Kemendikbudristek Dalam Mencapai Kampus Merdeka Dari Kekerasan **10**

Pengendalian Internal dalam Kerangka Kerja COSO 2013 **18**

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Dalam Mendukung Pekerjaan Auditor Internal Pemerintah **22**

Formula Baru itu adalah Balai Pelestarian Kebudayaan **34**

Waspada Infeksi Menular Seksual yang Merajalela **42**

#AwasiBersama



itjen.kemdikbud.go.id



fb.com/itjenkemendikbud



@itjen_kemdikbud



itjen_kemdikbud

Editorial

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, majalah ini bisa kembali hadir di hadapan para pembaca. Topik utama Forwas edisi pertama tahun 2023 ini mengenai Transformasi Perguruan Tinggi melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program MBKM yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2020 ini bertujuan untuk merombak sistem pendidikan tinggi di Indonesia agar lebih relevan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa serta tuntutan perkembangan dunia saat ini. Seiring perkembangannya, MBKM memberikan sarana bagi bertransformasinya dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Pada tajuk utama, kami mengenalkan lebih dalam perihal MBKM ke masyarakat, mulai dari peluang, hambatan, hingga berbagai subprogram dari MBKM yang sudah dijalankan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Peluang dan kendala yang disajikan dalam artikel merupakan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan melibatkan evaluator dari perguruan tinggi, sehingga pembaca dapat mengetahui kondisi nyata yang ditemui di lapangan.

Selain itu, menyambut hadirnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kami juga memuat pembahasan penggantian skripsi, tesis, atau disertasi sebagai tugas akhir perkuliahan mahasiswa, yang merupakan satu isu besar saat peraturan tersebut digulirkan. Artikel juga memuat bagaimana tugas akhir berupa penelitian sudah tidak relevan dengan dunia kerja dan dunia industri terkini, dan apa saja keunggulan dari tugas alternatif yang akan menggantikan skripsi dan tugas akhir bentuk penelitian lainnya.

Masih tentang merdeka belajar di lingkungan perguruan tinggi, dari aspek kemerdekaan dari kekerasan, kami juga memberikan artikel yang membahas tentang pencegahan kekerasan seksual (KS) di lingkungan perguruan tinggi.

Berbagai upaya telah dilakukan Kemendikbudristek, khususnya Itjen, untuk melakukan pencegahan dan penanganan KS di lingkungan Perguruan Tinggi, mulai dari penguatan payung hukum, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan KS di Kementerian, pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) bagi pegawai Kemendikbudristek, khususnya Itjen, untuk peningkatan kompetensi penanganan kasus ini. Selain itu, Itjen juga menghadirkan program pencegahan kekerasan yang dikemas dalam bentuk talkshow dengan nama Berisik.

Dari ranah pengawasan, kami menyajikan artikel mengenai standar dari *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* yang diadopsi sebagai standar pengendalian internal oleh banyak negara, termasuk oleh instansi pemerintahan di Indonesia. Dalam artikel dipaparkan tentang Kerangka Kerja Pengendalian Internal baru COSO 2013 yang akan membantu organisasi lebih efektif dan efisien mencapai tujuannya, serta mampu beradaptasi dengan perubahan pesat dari lingkungan bisnis dan operasi.

Selain itu, menyambut perkembangan *Artificial Intelligent* yang cukup pesat akhir-akhir ini, kami juga memuat artikel mengenai penggunaan AI dalam pelaksanaan tugas Auditor. Artikel diawali dari pembahasan mengenai pentingnya tugas Auditor, dan pentingnya pemanfaatan AI dalam pelaksanaan tugas auditor. Tak lupa dipaparkan mengenai contoh-contoh aplikasi atau platform AI yang dapat dipakai dalam pelaksanaan tugas Auditor.

Tidak hanya di bidang pendidikan, dari bidang kebudayaan, kami juga menyajikan artikel yang membahas tentang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan yang baru-baru ini mengalami reorganisasi.

Sebagai pelengkap, tak lupa kami menyisipkan artikel kesehatan yang bermanfaat bagi segenap pegawai. Pada edisi kali ini, kami mengangkat tema Infeksi Menular Seksual. Artikel menjelaskan mengenai penyebab penyakit terjadi, apa saja gejalanya, dan bagaimana pencegahannya.

MERDEKA BELAJAR

Kampus Merdeka

INDONESIA JAYA



PELUANG DAN HAMBATAN PELAKSANAANYA PADA PERGURUAN TINGGI

Oleh Sujatmiko Wibowo dan Bahari Mulawarman

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih siap dan sesuai dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, serta keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Sesuai dengan tuntutan kebutuhan lulusan perguruan tinggi yang siap dan sesuai dengan kebutuhan zaman tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada awal tahun 2020 menerbitkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan MBKM secara umum memberikan hak belajar bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan selama 3 (tiga) semester di luar program studi.

Kebijakan ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga perguruan tinggi dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak dini (Ditjen Dikti, 2020).

Terobosan Kemendikbudristek terkait Program Kampus Merdeka diharapkan dapat membangun sistem pembelajaran secara profesional dengan menyiapkan sumber daya manusia unggul, menguatkan kurikulum yang *integrated*, dan sarana prasarana yang memadai untuk bersaing secara global serta menghasilkan lulusan yang siap terjun di dunia kerja secara langsung.

Kebijakan MBKM ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Melalui program ini, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi (Ditjen Dikti, 2020).

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi meliputi: pertukaran pelajar/mahasiswa, magang/praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen dan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (KKNT).



Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka menjadi peluang sekaligus tantangan bagi perguruan tinggi dalam mempersiapkan lulusannya menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Untuk itu, perguruan tinggi dituntut dapat menyusun kebijakan dan manual mutu yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi. Di samping itu, kebijakan dan mutu yang ditetapkan harus didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri, dan peserta magang.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan auditor Inspektorat IV Itjen Kemendikbudristek dengan melibatkan evaluator dari perguruan tinggi, atas pengelolaan hibah PKKM untuk pelaksanaan dan evaluasi MBKM di lingkungan PTN dan PTS diketahui bahwa perguruan tinggi belum sepenuhnya menerjemahkan pelaksanaan kampus merdeka bagi mahasiswa yang akan melaksanakan program MBKM terkait dengan hak belajar 3 semester di luar prodi untuk dapat memperoleh tambahan kompetensi lain untuk bersaing di dunia kerja atau berwirausaha mandiri (IKU 1), permasalahan yang terjadi antaranya adalah:

- Belum semua perguruan tinggi menyusun kebijakan dan standar mutu yang terintegrasi dengan penjaminan mutu dan didiseminasikan serta disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.
- Belum semua perguruan tinggi mempunyai mekanisme formal dalam mengevaluasi dan memantau mahasiswa secara periodik untuk menjamin mutu program mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.
- Mahasiswa yang diberi kesempatan mengikuti petukaran pelajar/mahasiswa, magang/ praktik kerja masih diarahkan untuk mengambil bidang studi yang linier atau sama dengan bidang studi utama, misalnya mahasiswa prodi agribisnis atau teknik elektro dalam pelaksanaan MBKM di atas diarahkan tetap mengambil prodi agribisnis dan teknik elektro.
- Penetapan 20 SKS per semester bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM masih ditetapkan sebagai mata kuliah wajib, sedangkan sesuai arahan Mendikbudristek mahasiswa yang mengambil program MBKM diluar kampus merupakan mata kuliah pilihan. Hal ini karena kelemahan dalam merumuskan program pelaksanaan MBKM dalam buku panduan/pedoman yang ditetapkan pimpinan perguruan tinggi.



Penyiapan banyak tim penyusun juga menjadi kendala tersendiri karena sebagian besar tim biasanya belum berpengalaman dalam penyusunan peraturan, apalagi peraturan baru. Tidak semua kampus dapat merespons dengan cepat perubahan kurikulum Kampus Merdeka tersebut karena berbagai faktor, misalnya kebiasaan menunggu juklak dan juknis, terbatasnya anggaran untuk perubahan tersebut, dan yang penting sulitnya merubah "mindset lama" untuk perubahan yang baru.

e. Egoisme prodi, fakultas, atau institusi perguruan tinggi

Tidak bisa dimungkiri bahwa kendala yang nanti akan dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum Kampus Merdeka adalah egoisme sektoral baik di tingkat prodi, fakultas, atau perguruan tinggi. Klasterisasi akreditasi bisa menjadi salah satu penyebabnya. Akan sangat mungkin bahwa prodi dengan akreditasi A hanya akan menerima mahasiswa pertukaran pelajar yang sama-sama akreditasi A atau minimal akreditasi B. Lalu bagaimana dengan yang akrediasinya C? Mungkin saja terjadi bahwa perguruan tinggi dengan akreditasi C tidak akan bisa menerapkan dan melaksanakan program MBKM ini dengan baik.

f. Mematok biaya tertentu untuk membuat MoU dengan perguruan tinggi lainnya

Dalam kaitan dengan pertukaran riset atau mahasiswa, tidak menutup kemungkinan perguruan tinggi akan mematok biaya tertentu bahkan mungkin dengan harga yang tinggi untuk menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lainnya. Kita berharap bahwa ego sektoral ini tidak terjadi dan tidak mengemuka di dunia pendidikan kita, dalam pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini.

g. Finansial

Perubahan kurikulum akan berdampak pada perubahan anggaran. Anggaran keuangan orang tua mahasiswa bisa saja makin naik sebagai konsekuensi dari 8 (delapan) program tersebut, meskipun pelaksanaannya berbeda beda untuk tiap-tiap prodi. Ada peluang prodi-prodi bersaing untuk membuat program tertentu dan terpilih dari 8 (delapan) program tersebut yang bersifat *high cost*. Dari sisi pelaksana, perguruan tinggi, operasionalisasi 8 (delapan) program tersebut akan memaksa untuk menaikkan UKT (uang kuliah tunggal) mahasiswa sebagai biaya pelaksanaan kegiatan. Delapan jenis kegiatan dalam kurikulum tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya. Pilihan jalur dari delapan pilihan tersebut sangat mungkin ditentukan oleh faktor keuangan orang tua mahasiswa.

Kita mengetahui bahwa 8 (delapan) jalur pembelajaran di luar prodi tersebut adalah hak mahasiswa, bukan kewajiban. Hak tersebut tentu boleh diambil boleh juga tidak. Mahasiswa boleh memilih alternatif yang disediakan oleh prodi dari 8 (delapan) jalur tersebut. Boleh jadi tiap-tiap prodi berbeda dalam menentukan 8 (delapan) alternatif tersebut. Prodi akan cenderung memilih jalur yang mudah dilaksanakan, biaya ringan, dan tidak memerlukan energi besar. Akankah kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini dapat berjalan dengan baik? Sebuah dilema ada di hadapan para mahasiswa dan para pengelola institusi perguruan tinggi. Antara idealisme dan realitas pembelajaran.

Alternatif Pengganti Skripsi, Tesis, dan Disertasi dalam Meningkatkan Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia

Pendidikan tinggi telah lama menjadi fondasi penting dalam mempersiapkan individu untuk berkontribusi dalam masyarakat dan pasar kerja. Di banyak negara, salah satu komponen penting dalam pendidikan tinggi adalah penyelesaian tugas akhir dalam bentuk penelitian, seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Skripsi untuk tugas akhir program setara dengan strata satu atau sarjana/bachelor, tesis untuk tugas akhir program setara dengan strata dua atau magister/master, dan disertasi untuk tugas akhir program setara dengan strata tiga atau *doktor/philosophy doctor*. Tugas-tugas akhir ini telah dianggap sebagai penentu kesuksesan akademik dan profesional, serta sebagai alat untuk mengukur kemampuan analisis, meneliti, dan kontribusi pengetahuan yang diberikan oleh lulusan.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, paradigma pendidikan tinggi telah berubah secara signifikan. Perubahan dalam kebutuhan dan harapan dari dunia kerja, kemajuan teknologi, serta tantangan kompleks dalam masyarakat global yang terus berkembang telah memicu perdebatan tentang relevansi dan efektivitas tugas akhir tradisional ini. Beberapa masalah yang muncul meliputi tingginya beban kerja dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi, tesis, atau disertasi, kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam proyek dunia nyata, serta masalah biaya yang terkait dengan penelitian yang memerlukan sumber daya yang besar.

Menyikapi hal tersebut, baru-baru ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merilis peraturan baru terkait standar dan akreditasi pendidikan tinggi, yang di dalamnya termasuk mengatur bahwa skripsi, tesis, dan disertasi tidak lagi menjadi kewajiban mahasiswa untuk dapat lulus pada program S1, S2, maupun S3.

Melalui Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, terutama pada pasal 18, kebijakan tugas akhir dari mahasiswa tiap-tiap program dikembalikan kepada pimpinan program studi masing-masing.

Selayaknya perubahan yang disampaikan dalam peraturan-peraturan sebelumnya, perubahan ini juga menimbulkan pro dan kontra. Ada yang berpendapat bahwa hal ini merupakan langkah positif yang akan memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih tugas akhir yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Namun, ada pula insan pendidikan tinggi yang berpendapat bahwa hal ini akan menurunkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Saat artikel ini dirilis, terpantau belum 100%, atau bahkan belum 50% perguruan tinggi di Indonesia yang menyatakan akan menghapuskan atau tidak mewajibkan skripsi, tesis, maupun disertasi sebagai syarat kelulusan mahasiswanya.

Dalam tulisan ini, penulis akan mengurai pandangan mengenai keberadaan dari skripsi, tesis, dan disertasi mengenai apa limitasinya, dan apa pula keunggulan serta alasan ketiga hal tadi masih dipakai selama ini di Indonesia sebagai standar kelulusan mahasiswa.

Penulis juga akan menggali alternatif yang tepat sebagai pengganti skripsi, tesis, dan disertasi dalam rangka meningkatkan kualitas atau tetap mempertahankan standar lulusan dari pendidikan tinggi. Alternatif-alternatif ini akan dieksplorasi dalam konteks perubahan paradigma pendidikan tinggi, yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dengan lebih baik untuk tantangan dunia nyata dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan cepat berubahnya kebutuhan global.

Selain itu, penulis juga akan mengidentifikasi manfaat yang diharapkan dari penggunaan alternatif-alternatif ini dalam meningkatkan kualitas lulusan. Ini termasuk pengembangan keterampilan praktis, keterlibatan dalam proyek-proyek yang relevan dengan dunia kerja, serta pembentukan koneksi yang kuat dengan industri. Penulis berharap, artikel ini akan memberikan pandangan komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam menggantikan tugas akhir tradisional dengan alternatif yang lebih relevan dan efektif dalam meningkatkan kualitas lulusan dari perguruan tinggi.

Kelebihan Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Kemampuan Penelitian Mendalam: Skripsi, tesis, dan disertasi memungkinkan mahasiswa untuk melakukan penelitian mendalam dalam bidang studi mereka. Ini membantu mereka mengembangkan pemahaman yang kuat tentang topik tertentu dan menjadi ahli dalam area tersebut. Selain itu, mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir semacam ini akan memperoleh keterampilan penelitian seperti metodologi penelitian, analisis data, dan pemahaman tentang bagaimana mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan bukti ilmiah. Singkatnya, pengerjaan tugas akhir ini mampu mengubah pola pikir mahasiswa karena adanya pengembangan keterampilan analitis dan kritis yang didapat dari pengerjaan penelitian dalam waktu terbilang lama.

Kontribusi Pengetahuan: Tugas akhir ini dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru atau penambahan terhadap pengetahuan yang sudah ada dalam bidang studi tertentu. Mereka dapat berkontribusi pada perkembangan ilmiah dan akademik secara keseluruhan.

Pengembangan Kemampuan Menulis dan Kemampuan Kritis: Mahasiswa yang menulis skripsi, tesis, atau disertasi akan mengembangkan kemampuan menulis akademik yang kuat. Ini termasuk kemampuan menyusun argumen yang koheren, menyajikan data dengan jelas, dan merinci metodologi penelitian. Melalui proses penelitian dan analisis yang mendalam, mahasiswa juga akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Mereka akan belajar untuk mengevaluasi informasi, mengidentifikasi kelemahan dalam argumen, dan merumuskan pandangan mereka sendiri.

Kekurangan Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Namun, layaknya dua mata pisau, selain dari kelebihan, pengerjaan skripsi, tesis, dan disertasi juga memiliki kekurangan dan limitasi bagi mahasiswa, yaitu

Beban Kerja dan Waktu yang Tinggi: Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh mahasiswa yang harus menyelesaikan skripsi, tesis, atau disertasi adalah beban kerja yang tinggi. Proses penelitian yang intensif, analisis data yang rumit, dan tuntutan penyusunan laporan yang komprehensif memerlukan investasi waktu dan energi yang signifikan. Bahkan untuk jenjang yang lebih tinggi, akan lebih banyak lagi waktu dan energi yang dihabiskan. Mahasiswa sering kali merasa tertekan oleh tuntutan untuk tugas akhir ini dalam batas waktu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Masalah lain terkait dengan beban kerja yang tinggi adalah ketidakseimbangan antara pekerjaan akademik dengan komitmen lainnya, seperti pekerjaan paruh waktu mahasiswa.

Kurangnya Relevansi dengan Dunia Kerja: Salah satu kritik utama terhadap skripsi, tesis, dan disertasi adalah kurangnya relevansi mereka dengan dunia kerja. Kadang-kadang, penelitian yang dilakukan dalam konteks tugas akhir ini lebih bersifat teoritis daripada praktis sehingga lulusan sering kesulitan mengaplikasikan pengetahuan hasil dari penelitian mereka dalam pekerjaan nyata. Ini menciptakan kesenjangan antara kualifikasi akademis dan kebutuhan dunia kerja, yang dapat menghambat proses pencarian pekerjaan dan perkembangan karier mahasiswa. Hal ini tentu saja menjadi penanda kekurangan terbesar dari tugas akhir berbentuk penelitian bila dibandingkan dengan tugas akhir dalam beberapa bentuk yang lebih praktikal seperti: magang terstruktur di dunia kerja; pengerjaan proyek untuk memberdayakan masyarakat; dan beberapa tugas praktikal lainnya.

Masalah Biaya: Penelitian yang dilakukan dalam skripsi, tesis, atau disertasi sering kali memerlukan sumber daya finansial yang tidak sedikit. Ini termasuk biaya transportasi ke objek penelitian, pengadaan bahan penelitian, dan pengeluaran terkait

penelitian lainnya. Salah satu contoh hambatan dari sisi biaya, biasanya responden menginginkan sesuatu atau imbalan setelah mereka mengisi kuesioner penelitian, bila tidak, kemungkinan tidak banyak responden yang bersedia terlibat. Bagi mahasiswa yang tidak memiliki dana ataupun akses ke dana yang cukup, ini dapat menjadi hambatan serius dalam mengejar tugas akhir mereka dengan baik.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kekurangan-kekurangan ini, kita dapat merumuskan alternatif yang lebih sesuai dan efektif dalam meningkatkan kualitas lulusan dari pendidikan tinggi. Alternatif-alternatif ini harus mampu mengatasi kekurangan-kekurangan yang telah diidentifikasi sambil memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan kelebihan pengerjaan skripsi, tesis, dan disertasi bagi mahasiswa dan dunia kerja.

Alternatif Pengganti Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Ada berbagai alternatif yang dapat diusulkan sebagai pengganti skripsi, tesis, dan disertasi dalam rangka mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas lulusan. Alternatif-alternatif ini harus dapat mengatasi kekurangan-kekurangan yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti beban kerja yang tinggi, kurangnya relevansi dengan dunia kerja, dan masalah biaya. Alternatif ini harus pula memberikan manfaat yang sama besar atau bahkan lebih besar dari keunggulan pengerjaan skripsi, tesis, dan disertasi dalam hal peningkatan kemampuan mahasiswa dan kontribusi nyata di masyarakat. Berikut adalah alternatif-alternatif tugas akhir tersebut:

Proyek Kolaboratif, salah satu alternatif yang menarik untuk dilaksanakan adalah proyek kolaboratif. Dalam pendekatan ini, mahasiswa bekerja dalam tim dari latar belakang multidisiplin untuk menyelesaikan proyek-proyek inovatif yang relevan dengan disiplin ilmu mereka. Proyek-proyek ini dapat mencakup penelitian, pengembangan produk atau layanan, atau bahkan solusi untuk masalah sosial yang nyata.



Tim Kerja Multidisiplin: Kolaborasi antara mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu memungkinkan pertukaran ide dan pengetahuan yang kaya. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang beragam dan mempersiapkan mahasiswa untuk berkolaborasi di dunia nyata.

Proyek-proyek Inovatif: Proyek-proyek ini harus merangsang kreativitas dan inovasi. Mereka dapat mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pemahaman mendalam tentang topik tertentu. Proyek yang dilaksanakan tentu saja sesuai dengan latar belakang ilmu yang dipelajari mahasiswa. Contoh: proyek pembuatan aplikasi berbasis AI yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat bagi mahasiswa jurusan Teknologi Informatika. Untuk pembiayaan, mahasiswa bisa mengajukan proposal ke perusahaan. Perusahaan yang relevan tentu lebih tertarik membiayai, karena hal ini dapat memberikan keuntungan langsung bagi mereka dalam bentuk sebuah produk yang siap dipasarkan/dipakai masyarakat.

Portofolio

Alternatif lain adalah pengembangan portofolio. Mahasiswa dapat mengumpulkan karya-karya mereka selama masa studi mereka, seperti esai, presentasi, proyek-proyek, dan prestasi akademik lainnya. Portofolio ini dapat digunakan untuk mencerminkan pencapaian dan perkembangan mereka selama studi. Tentu saja ada batasan dan standar minimal mengenai karya apa yang bisa dimasukkan dalam portofolio. Selain dari kuantitas, kualitas pengerjaan karya harus dikawal oleh dosen pembimbing yang sedari awal studi membimbing mahasiswa.

Magang dan Praktik Lapangan

Alternatif lain adalah memasukkan pengalaman magang dan praktik lapangan sebagai pengganti tugas akhir. Mahasiswa dapat bekerja di industri atau organisasi yang relevan dengan program studi mereka untuk mendapatkan pengalaman praktis. Tentu saja tugas magang ini harus berbeda dengan tugas magang pengganti 20 SKS dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dalam tugas magang ini, mahasiswa diberikan proyek yang lebih signifikan dan relevan dengan bidang studi, atau menyelesaikan satu proyek tertentu yang sedang dikembangkan perusahaan sehingga membuatnya pantas menggantikan tugas akhir dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi.

Selain dari pengalaman praktis, ada juga koneksi industri yang didapat oleh mahasiswa bila memilih tugas akhir ini. Mahasiswa dapat membangun jaringan profesional dan mendapatkan wawasan tentang persyaratan dan ekspektasi industri yang terkini/aktual.



Prototipe Produk - Prototipe adalah model awal atau representasi sederhana dari suatu produk atau sistem yang dirancang untuk menguji konsep, fitur, dan fungsi potensialnya. Prototipe digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengembangan perangkat lunak, desain produk fisik, dan proyek-proyek teknologi. Mahasiswa dapat mengembangkan prototipe produk untuk tugas akhir mereka, terutama untuk jurusan-jurusan vokasi atau kejuruan. Contohnya, mahasiswa dari jurusan mesin otomotif dapat membuat prototipe kendaraan bermotor bersama timnya. Dari sisi pembiayaan, proyek ini juga bisa dibiayai langsung oleh perusahaan yang dibuatkan prototipe produk sehingga hal ini akan menguntungkan mahasiswa yang bisa terbebas dari biaya penelitian yang tinggi.

Publikasi Ilmiah - Alternatif terakhir dari tugas akhir adalah memotivasi mahasiswa untuk berkontribusi dalam publikasi ilmiah. Ini dapat mencakup menulis artikel ilmiah, konferensi, atau berpartisipasi dalam riset bersama dengan fakultas. Walaupun sama-sama melakukan penelitian, tapi publikasi ini memberikan manfaat lebih nyata ke dunia pendidikan. Mahasiswa dapat berperan aktif dalam kontribusi pengetahuan dalam disiplin ilmu mereka, yang dapat meningkatkan penghargaan mereka terhadap proses penelitian. Selain itu, Mahasiswa dapat berbagi hasil penelitian mereka dengan masyarakat ilmiah dan industry serta memfasilitasi penyebaran pengetahuan yang bermanfaat. Bentuk tugas akhir ini sangat cocok untuk mahasiswa yang ingin memilih jalur karier sebagai akademisi atau pun peneliti.

Manfaat Penerapan Alternatif Tugas Akhir

Baik bagi mahasiswa, perguruan tinggi, maupun masyarakat, penerapan alternatif tugas akhir selain dari skripsi, tesis, dan disertasi memberikan ragam manfaat, di antaranya:

Pengembangan Keterampilan Praktis, Salah satu manfaat utama dari penggunaan alternatif seperti proyek kolaboratif, magang, atau penelitian terapan adalah pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja. Mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk mengasah keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kerja tim yang sangat dihargai dalam lingkungan profesional. Mahasiswa juga akan belajar untuk menganalisis situasi, mengevaluasi solusi, dan membuat keputusan berdasarkan data dan bukti. Selain itu, pengalaman lapangan dan magang akan membantu mahasiswa mengatasi tantangan nyata, mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi yang efektif.

Melalui kolaborasi dengan rekan tim, mahasiswa juga akan meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, baik dalam presentasi lisan maupun tulisan, yang penting dalam berinteraksi dengan kolega dan atasan di tempat kerja. Keterampilan bekerja sama juga akan semakin kuat, karena dalam pengerjaan proyek ataupun prototipe, memungkinkan mahasiswa untuk belajar bagaimana berkontribusi secara efektif dalam tim baik dari disiplin yang sama maupun dari multidisiplin.

Keterlibatan dalam Proyek Relevan - Alternatif seperti proyek kolaboratif dan penelitian terapan juga memberikan manfaat dalam hal keterlibatan mahasiswa dalam proyek-proyek yang memiliki relevansi langsung dengan dunia kerja dan kebutuhan industri. Mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh selama studi dalam konteks proyek dunia nyata, yang akan membuat pembelajaran mereka lebih berarti.

Magang dan kerja lapangan memberikan wawasan berharga tentang operasi dan tuntutan industri yang aktual, yang membuat mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung berinteraksi dengan industri, membantu mahasiswa untuk lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.

Pembentukan Koneksi Industri

Alternatif seperti magang dan penelitian terapan dapat membantu mahasiswa membangun jaringan profesional yang kuat. Ini dapat menjadi aset berharga ketika mereka mencari pekerjaan atau mengembangkan karier mereka. Mereka dapat memperoleh jaringan melalui interaksi dengan profesional di industri. Dengan begitu mahasiswa dapat membangun jaringan kontak yang dapat memberi mereka peluang karier di masa depan.

Magang yang sukses juga seringkali menghasilkan rekomendasi atau referensi dari atasan yang dapat meningkatkan peluang mahasiswa dalam mencari pekerjaan atau pengembangan karier.

Penerapan Pengetahuan dalam Konteks Nyata - Manfaat akhir dari alternatif-alternatif ini adalah kemampuan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh selama studi mereka dalam konteks dunia nyata. Mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk menguji teori-teori yang mereka pelajari dan melihat bagaimana pengetahuan tersebut berfungsi dalam situasi sehari-hari. Lebih dari itu, dengan melihat dampak positif dari kontribusi mereka dalam proyek-proyek yang relevan, mahasiswa dapat merasakan kepuasan pribadi dan motivasi untuk belajar lebih lanjut.

Komitmen untuk Menjaga Standar Mutu Lulusan - Seperti yang telah disinggung di awal artikel, adapula kontra terhadap penggantian tugas akhir dari skripsi, tesis, dan disertasi ke dalam bentuk tugas alternatif lainnya. Salah satu alasan dari kontra tersebut adalah, dikhawatirkan standar mutu lulusan dari perguruan tinggi akan menurun karena mahasiswa bisa saja memilih tugas paling mudah agar bisa cepat lulus. Untuk mengantisipasi hal ini, tentu saja ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, di antaranya:

Kurikulum yang Terintegrasi: Pastikan bahwa tugas akhir alternatif terintegrasi dengan baik dalam kurikulum program studi. Hal ini membuat mahasiswa memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang cukup sebelum mereka memulai tugas akhir mereka.

Panduan dan Bimbingan Mahasiswa yang Kuat: Perguruan tinggi harus memberikan panduan dan bimbingan yang kuat kepada mahasiswa dalam memilih dan menjalankan tugas akhir alternatif. Dosen pembimbing harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang jenis tugas akhir yang mereka bimbing. Dosen pembimbing juga sebaiknya mendapat tambahan pelatihan yang mendukung kompetensi mereka terhadap tugas yang dibimbingnya, sehingga dosen semakin cakap dalam mengarahkan mahasiswa.

Monitoring dan Evaluasi yang Ketat: Pengerjaan tugas akhir berkelompok rentan dengan risiko kecurangan atau ada mahasiswa yang tidak terlalu berkontribusi pada penyelesaian tugas. Hal ini bisa dicegah dengan memberikan instrumen monitoring yang tepat. Monitoring tidak hanya melibatkan dosen pembimbing dan supervisor dari perusahaan tempat proyek dilaksanakan, namun juga harus melibatkan penilaian dari teman-teman. Dengan begitu, bila ada mahasiswa yang kurang terlibat dapat langsung terlihat pada kolom penilaian rekan setimnya.

Proses evaluasi yang ketat juga mencakup proposal tugas akhir, tahap tengah, dan evaluasi akhir. Kriteria penilaian harus jelas dan obyektif. Dari hasil monitoring dan evaluasi, bisa dilakukan perbaikan pada proyek atau tugas yang dikerjakan, bila memang dirasa perlu.

Umpan Balik Mahasiswa

Minta umpan balik dari mahasiswa tentang pengalaman mereka dengan tugas akhir alternatif. Ini dapat membantu dalam melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pengerjaan tugas akhir.

Pembandingan dengan Standar Industri: Pelajari standar industri atau praktik terbaik dalam disiplin tertentu dan pastikan bahwa tugas akhir alternatif memenuhi atau melampaui standar tersebut.

Pengembangan Jaringan dengan Industri: Perguruan tinggi dapat memperkuat hubungan dengan industri dan pemangku kepentingan eksternal untuk memastikan bahwa tugas akhir alternatif mencerminkan kebutuhan dunia kerja.

Kebijakan skripsi, tesis, dan disertasi tidak lagi merupakan kewajiban mahasiswa untuk dapat lulus dari program pendidikan merupakan langkah positif yang memberikan keleluasaan bagi perguruan tinggi dan mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Hal ini merupakan bagian dari program Merdeka Belajar yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, dengan lebih memberikan kebebasan bagi pelaku pendidikan berkreasi dan mencapai potensi maksimal yang mereka raih.

Banyak keunggulan atau kelebihan tugas alternatif baik bagi mahasiswa, perguruan tinggi, maupun dunia industri serta masyarakat luas dibandingkan pengerjaan skripsi, tesis, dan disertasi. Manfaat pengerjaan skripsi, tesis, dan disertasi pun bisa digantikan ataupun dilampaui oleh manfaat pengerjaan tugas alternatif. Hal ini membuat pengerjaan tugas alternatif menjadi pilihan yang baik bagi mahasiswa maupun perguruan tinggi tempat ia menempuh ilmu.

Namun, perlu ada evaluasi dan monitoring yang ketat untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak akan menurunkan mutu pendidikan tinggi, dan memastikan walau tanpa pengerjaan penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi, namun kualitas lulusan perguruan tinggi Indonesia tetap sama baik bahkan bisa lebih baik lagi.

Romanti Sawitri, S.I.Kom., MBA

Hai... Saya Romanti Sawitri, Mari Kita Ikut Mencerdaskan Generasi Bangsa dengan Membaca dan Menulis, Seperti Halnya Pesan

Eyang B.J. Habibie

“Kalau Bukan Anak Bangsa Ini Yang membangun Bangsanya, Siapa Lagi? Jangan Saudara Mengharapkan Orang lain yang Datang Membangun Bangsa Kita”



Upaya Itjen Kemendikbudristek Dalam Mencapai Kampus Merdeka Dari Kekerasan

Oleh Romanti Sawitri dan Rindias H. Fatmasari

Lingkungan perguruan tinggi yang merdeka dari segala bentuk kekerasan adalah prinsip mendasar dalam menciptakan suasana pendidikan yang aman, inklusif, dan produktif. Pentingnya menjaga lingkungan perguruan tinggi dari ancaman berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, tidak bisa diabaikan. Lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan bukan hanya memberikan rasa aman bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan kampus, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berkembang secara optimal dalam proses pembelajaran dan penelitian. Ada tiga jenis kekerasan yang paling sering terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk lingkup pendidikan tinggi, yaitu Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) senantiasa berprinsip bahwa tindak kekerasan dalam bentuk apapun di lingkungan pendidikan tidak pernah dibenarkan, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, kita perlu menciptakan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua peserta didik tanpa terkecuali.

Lingkungan dengan karakteristik itulah yang dimaksud sebagai lingkungan kampus merdeka dari kekerasan, yang ingin dicapai oleh Kementerian.

Dalam rangka mencapai dan mempertahankan lingkungan kampus merdeka dari kekerasan tersebut, Kemendikbudristek telah melakukan beberapa upaya selama beberapa tahun terakhir. Upaya tersebut mulai dari mengeluarkan payung hukum, melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan, mendampingi dan mendukung pembentukan satuan tugas anti kekerasan di masing-masing perguruan tinggi, menyediakan kanal pengaduan, hingga pendampingan korban kekerasan. Inspektorat Jenderal (Itjen), selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kemendikbudristek memegang peranan penting dalam upaya ini, di mana instansi ini adalah pihak yang mengambil porsi dalam menangani kasus kekerasan di lingkungan pendidikan dan mengupayakan

1. Penguatan Payung Hukum bagi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi

Upaya pertama dan juga menjadi dasar bagi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi adalah penciptaan payung hukum yang menaungi semua kegiatan tersebut. Payung hukum memberikan kerangka kerja yang jelas dan dapat diandalkan untuk mengatur segala hal terkait PPKS, dan mengikat pihak-pihak yang diatur untuk dapat mematuhi aturan yang tercantum di dalamnya. Kemendikbudristek dalam hal ini telah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Selanjutnya, tidak hanya di satuan pendidikan, Mendikbudristek juga mengeluarkan regulasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi. Yang terbaru, untuk memperbaharui Permendikbud Nomor 85 Tahun 2015, Mendikbudristek mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). Setelah Permendikbudristek terbaru itu disahkan, Mendikbudristek menyampaikan rasa bahagiannya karena akhirnya Indonesia memiliki regulasi yang jauh lebih kuat dan jelas untuk menciptakan dunia pendidikan yang lebih aman, nyaman, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan.

Selang dua tahun pasca peluncuran Permendikbudristek PPKS, hasil nyata telah terlihat di dunia pendidikan tinggi. Perguruan tinggi di seluruh Indonesia telah mengambil langkah konkret dalam mengatasi kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mahasiswa dan seluruh anggota komunitas akademik.

Selain memberikan dampak positif pada lingkungan perguruan tinggi, kehadiran Permendikbudristek PPKS juga memiliki dampak besar dalam upaya mengatasi kekerasan seksual di masyarakat. Data dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa sejak diberlakukan, lebih banyak kasus pelecehan yang dilaporkan daripada perkosaan, menunjukkan bahwa masyarakat telah lebih sadar akan jenis-jenis kekerasan seksual dan lebih berani melapor.

2. Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan

Berdasarkan Permendikbudristek mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan yang telah dibentuk di atas, Mendikbudristek kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan di Lingkungan Kemendikbudristek yang diketuai oleh Inspektur Jenderal Chatarina Muliana, pucuk pimpinan tertinggi di Itjen. Dalam hal pencegahan, Pusat Pembentukan Karakter (Puspeka) memegang peranan penting untuk mengampanyekan program-program pencegahan kasus kekerasan. Adapun untuk penanganan, sebagai APIP, Inspektorat Jenderal berperan untuk memantau kinerja satgas dari berbagai satuan tugas di perguruan tinggi dan jika diperlukan, akan turun langsung untuk melihat bagaimana penyelesaian kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lapangan.

3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bagi Auditor Inspektorat Jenderal

Sebagai APIP di lingkungan Kemendikbudristek, para auditor di Inspektorat Jenderal tentu terbiasa untuk melihat berbagai kasus dari kaca mata pemeriksa atau pengawas. Namun, untuk kasus kekerasan, perlu ada kecakapan dan keterampilan tambahan yang harus dimiliki oleh para auditor sebagai bekal untuk menyelesaikan kasus di lapangan.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas berupa bimbingan teknis dipandang perlu dilakukan. Sampai Agustus 2023, Inspektorat Jenderal sudah dua kali mengadakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas dalam penanganan kasus kekerasan. Tidak hanya auditor, yang disasar dalam bimtek tersebut juga semua anggota Satgas Pokja Penanganan Kekerasan. Dengan bimtek yang dilakukan secara rutin, diharapkan para anggota satgas dapat memiliki pemahaman dan kemampuan yang sama dalam hal menangani kasus kekerasan, baik di satuan pendidikan, maupun di lingkungan kampus.

Dalam rangka peningkatan kapasitas, Inspektorat Jenderal menghadirkan berbagai ahli untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk menjadi bekal bagi para auditor dan anggota satgas pencegahan dan penanganan kekerasan. Ahli yang menjadi narasumber menyampaikan berbagai materi yang dapat memperkaya wawasan, seperti mengenai psychological first aids, keamanan digital, dan teknik wawancara bagi korban dan pelaku kekerasan. Narasumber tersebut di antaranya Komisi Nasional (Komnas) Perempuan RI Alimatul Qibtiyah; Ketua Pusat Kajian Hukum, Perempuan, dan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Wiyanti Eddyono; perwakilan dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Faqihuddin Abdul Qodir; Asep Iwan Iriawan dari kalangan hukum, dan masih banyak ahli lainnya. Selain itu, para peserta juga diberikan materi mengenai berbagai perspektif dan pandangan, baik itu mengenai perbedaan gender, agama, dan budaya dari berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan.

4. Penyediaan Kanal Pengaduan

Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek juga telah menyediakan berbagai kanal pengaduan, termasuk juga pengaduan soal kasus perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual.

Kanal yang disediakan di Inspektorat Jenderal, yaitu lapor.kemdikbud.go.id, wbs.kemdikbud.go.id, dan posko-pengaduan.itjen.kemdikbud.go.id. Masyarakat juga dapat langsung datang ke Rumah Cegah Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek yang berlokasi di kantor instansi ini. Rumah Cegah adalah sebuah wadah bagi masyarakat yang ingin menjangkau Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, menyampaikan pertanyaan, keluhan, dan aduan di lingkungan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Tidak hanya berdiri secara fisik, Rumah Cegah juga memiliki Platform daring yang dapat diakses di rumahcegah.kemdikbud.go.id sehingga dapat dijangkau dari manapun. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga ikut memantau dan menindaklanjuti kasus-kasus yang terjadi dan sudah diketahui oleh banyak orang melalui berbagai media, utamanya kasus viral di media sosial tertentu.

5. Pendampingan korban dan Upaya Mediasi

Apabila kasus kekerasan telah terjadi, auditor Inspektorat Jenderal turut serta mendampingi korban dan melakukan mediasi dalam upaya pemeriksaan dan penyelesaian kampus. Berbekal ilmu yang telah didapat dari Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas, auditor Itjen menjadi lebih kompeten dalam penanganan kasus, dengan berfokus pada memperhatikan kepentingan dan kebutuhan korban. Kebanyakan kasus kekerasan, utamanya kekerasan seksual mengguncang psikologis korban, karena itu auditor Itjen memperhatikan pula aspek ini dalam pendampingan korban.

Untuk kasus perundungan, dengan pelaku sebagian besar adalah sesama siswa, Inspektorat Jenderal juga mengupayakan mediasi, dengan berprinsip bahwa pelaku juga merupakan anak dan pelajar yang harus dibina, bukan hanya dihukum. Demikian halnya dengan kasus intoleransi, Inspektorat Jenderal berupaya memediasi dan mencapai pemahaman sama antara pelaku intoleransi dan korban, sehingga mendapat jalan keluar terbaik. Namun, pemberian rekomendasi berupa sanksi terhadap pelaku juga tetap dilakukan sesuai porsi kesalahannya.

6. Program Pencegahan Dikemas dalam Bentuk Talkshow

Tidak hanya dalam hal penanganan, Inspektorat Jenderal juga memiliki program pencegahan kekerasan yang dikemas dalam bentuk talkshow, dengan nama BERISIK yang merupakan singkatan dari Berbicang Asik. Jika di tahun sebelumnya tema yang diangkat dalam acara tersebut adalah mengenai integritas, tahun 2023 ini tema yang diangkat adalah kebinekaan. Peserta dalam acara ini adalah mahasiswa dari kota-kota yang menjadi tempat pelaksanaan talkshow. Beberapa kota besar pernah dihampiri oleh Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan acara ini, di antaranya Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Malang. Pelaksanaan acara di beberapa titik dengan tujuan untuk menjangkau peserta yang lebih beragam dan meluas. Acara ini dikemas dengan santai agar dapat menanamkan nilai-nilai kebinekaan kepada mahasiswa. Melalui acara ini, diharapkan para peserta dapat menghargai keberagaman dan menghindari praktik-praktik perundungan, intoleransi, bahkan kekerasan seksual.

Antusiasme peserta terlihat di setiap kegiatan BERISIK, yang dapat dilihat cuplikannya dalam akun instagram [@itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud). Narasumber yang pernah hadir dalam talkshow ini di antaranya influencer Sakdiyah Ma'ruf, penulis Irfan Amalee, Tokoh Agama Habib Husein Jafar, influencer Onadio leonardo, Musisi Yosi Mokalalu, dan Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi. Dalam acara tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara langsung dengan para narasumber.

Beberapa upaya tadi menjadi salah satu fokus perhatian Inspektorat Jenderal pada khususnya dan Kemendikbudristek pada umumnya, dalam rangka mencapai kemerdekaan belajar dari kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Dengan adanya kemerdekaan, segenap civitas akademika dapat melakukan aktivitas dengan optimal tanpa adanya gangguan yang dapat menghambat perkembangan mereka. Insan pendidikan tinggi yang mampu mengoptimalkan potensinya menjadi modal yang sangat baik bagi berkembangnya suatu negara, yang pada akhirnya akan menguatkan dan memajukan martabat negara tersebut. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek akan senantiasa melakukan upaya terbaik agar kemerdekaan belajar di lingkungan kampus dapat terwujud demi menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua.



Romanti Sawitri, S.I.Kom., MBA.



Dalam menjalankan aktivitas sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), pengendalian internal merupakan salah satu ranah utama dari Inspektorat Jenderal (Itjen). Pengendalian internal sendiri menurut Institute of Internal Audit (IIA) adalah semua aksi yang diambil manajemen, badan direktur, dan anggota lain untuk meningkatkan manajemen risiko dan meningkatkan kemungkinan tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Adapun menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Masih menurut PP 60 Tahun 2008, tujuan dilakukannya pengendalian internal adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

1. kegiatan yang efektif dan efisien;
2. laporan keuangan yang dapat diandalkan;
3. pengamanan aset negara; serta
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Standar pengendalian internal yang dipakai hampir seluruh organisasi di dunia, dan diterapkan pula oleh instansi pemerintahan di Indonesia adalah standar dari *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*.

COSO sendiri diawali dari kesepakatan lima asosiasi dan institut akuntansi utama di Amerika Serikat pada pertengahan 1980-an untuk bergabung dalam sebuah komite. Kelima asosiasi dan institut tadi tergabung dalam *National Commission on Fraudulent Financial Reporting*. Misi awal COSO adalah mempelajari pelaporan keuangan dan mengembangkan rekomendasi untuk pencegahan fraud atau kecurangan (KPMG, 2013).



Definisi pengendalian internal dikutip langsung dari COSO 2013 yaitu:

Internal control is a process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance. (COSO, 2013).

COSO menyatakan keseluruhan pihak dari sebuah entitas/organisasi mempengaruhi pengendalian internal, dan bahwa pengendalian internal menyediakan keyakinan memadai (tetapi bukan mutlak) terkait pencapaian tujuan organisasi dalam aspek operasional, pelaporan, dan kepatuhan.

Standar utama COSO, yaitu Kerangka Kerja Pengendalian Internal diluncurkan tahun 1992, yang mana menyediakan kerangka kerja menyeluruh untuk membantu organisasi menilai, mempertahankan, hingga meningkatkan sistem pengendalian internalnya. Standar ini merupakan konsep pengendalian internal terintegrasi pertama dan diterima serta dipakai secara luas oleh organisasi-organisasi di dunia baik swasta maupun organisasi publik/pemerintahan di seluruh dunia. Kerangka COSO membagi definisi pengendalian internal ke dalam lima (5) unsur yaitu: lingkungan pengendalian, asesmen risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta *monitoring*.

Pada 2013, atas beberapa pertimbangan tertentu, standar ini diperbaharui menjadi Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO 2013. Pertimbangan pembaharuan kerangka COSO meliputi perubahan dalam lingkungan operasional dan bisnis yang didorong oleh perubahan teknologi dan globalisasi. Perubahan tersebut menuntut sistem pengendalian internal yang lebih terintegritas agar dapat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan sehingga organisasi lebih transparan, akuntabel, dan memenuhi syarat tata kelola yang baik.

Pada 2013, atas beberapa pertimbangan tertentu, standar ini diperbaharui menjadi Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO 2013. Pertimbangan pembaharuan kerangka COSO meliputi perubahan dalam lingkungan operasional dan bisnis yang didorong oleh perubahan teknologi dan globalisasi. Perubahan tersebut menuntut sistem pengendalian internal yang lebih terintegritas agar dapat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan sehingga organisasi lebih transparan, akuntabel, dan memenuhi syarat tata kelola yang baik.

Kerangka Kerja Pengendalian Internal baru COSO 2013 akan membantu organisasi lebih efektif dan efisien mencapai tujuannya, serta mampu beradaptasi dengan perubahan pesat dari lingkungan bisnis dan operasi.

Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO 2013 terdiri dari tiga *volume* yaitu:

Ringkasan eksekutif: memberikan gambaran umum mengenai kerangka pengendalian intern bagi para dewan pengawas (*board of directors*), puncak pimpinan, dan manajemen puncak lainnya.

Kerangka kerja dan apendiks: menetapkan kerangka, mendefinisikan, dan menjelaskan persyaratan pengendalian internal yang efektif termasuk komponen dan prinsip-prinsip, serta titik fokus dari tiap prinsip. Lebih lanjut memberikan petunjuk bagi semua tingkatan manajemen dalam merancang, melaksanakan, dan mengarahkan pengendalian internal serta menilai efektivitas implementasinya.

Tools ilustratif: menyediakan templat, pola, dan skenario yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal dalam organisasi.

Perubahan dalam Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO 2013

Perubahan Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO 2013 dilakukan dengan menjabarkan lebih jauh lima (5) komponen pengendalian internal, di mana ditetapkan secara eksplisit/jelas sebanyak tujuh belas (17) prinsip dan delapan puluh tujuh (87) titik fokus. Setiap titik fokus dipetakan secara langsung pada salah satu dari 17 prinsip dan tiap-tiap prinsip dipetakan secara langsung pada setiap dari 5 komponen. Sebelumnya, kerangka COSO 1992 hanya menjabarkan secara implisit/tersirat prinsip utama dari pengendalian internal.

Berikut adalah pemetaan komponen dan prinsip dari Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO 2013.

Komponen 1 - Lingkungan Pengendalian

Prinsip-prinsip dari komponen 'Lingkungan Pengendalian':

1. Menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika;
2. Melakukan pengawasan yang bertanggung jawab;
3. Menetapkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab;
4. Menunjukkan komitmen terhadap kompetensi;
5. Menegakkan akuntabilitas.

Komponen 2 - Penilaian Risiko

Prinsip-prinsip dari komponen 'Penilaian Risiko':

6. Menentukan tujuan yang sesuai;
7. Identifikasi dan analisis risiko;
8. Penilaian risiko atas fraud;
9. Identifikasi dan analisis perubahan yang signifikan.

Komponen 3 - Kegiatan Pengendalian

Prinsip-prinsip dari komponen 'Kegiatan Pengendalian':

10. Pemilihan dan pengembangan kegiatan pengendalian;
11. Pemilihan dan pengembangan pengendalian terhadap teknologi;
12. Implementasi melalui kebijakan dan prosedur.

Komponen 4 - Informasi dan komunikasi

Prinsip-prinsip dari komponen 'Informasi dan Komunikasi':

13. Menggunakan informasi yang relevan;
14. Komunikasi secara internal;
15. Komunikasi secara eksternal.

Komponen 5 - Pemantauan

Prinsip-prinsip dari komponen 'Informasi dan Komunikasi':

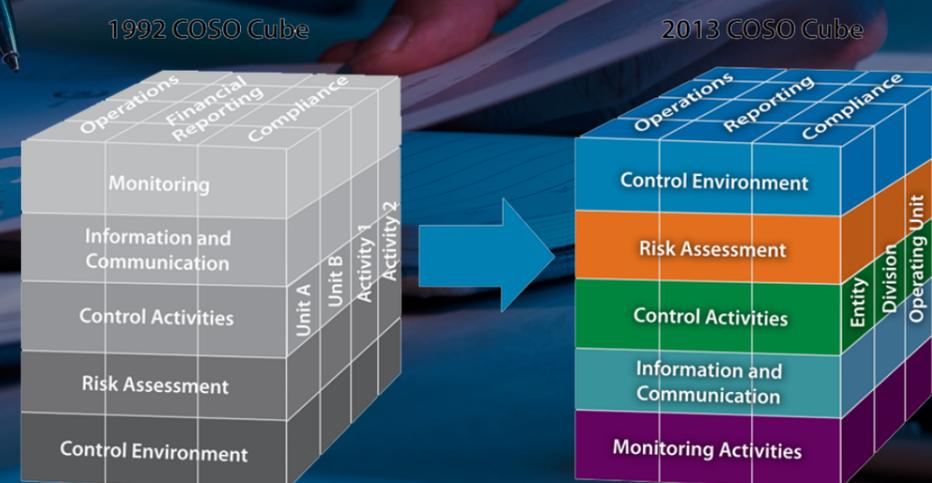
16. Melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah;
17. Mengevaluasi dan mengkomunikasikan "deficiencies" (kelemahan).

Dengan kerangka pengendalian internal melalui pendekatan komponen, prinsip, dan titik fokus yang lebih rinci dijelaskan, akan membantu pengguna lebih mudah memahami inti pengendalian internal serta jelas dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal sehingga proses tersebut berjalan efektif. Komponen dan prinsip yang telah ditetapkan akan menciptakan suatu kriteria dan titik fokus yang akan membantu manajemen dalam menilai apakah komponen-komponen dalam pengendalian internal itu ada, berfungsi, dan beroperasi secara bersamaan dalam organisasi.

Perubahan lain dari kerangka versi baru adalah, lebih jelasnya peranan dari penyusunan tujuan dalam proses pengendalian internal. Kerangka versi baru merubah pandangan bahwa penyusunan tujuan bukan merupakan bagian dari pengendalian internal. Dalam kerangka versi baru juga terdapat relevansi pada penggunaan teknologi yang meningkat signifikan, seiring kemajuan zaman yang pesat. Selain itu, kerangka versi baru juga telah mengembangkan konsep tata kelola yang baik, dengan memasukkan unsur pengawasan dari dewan pengawas/komisaris untuk menciptakan pengendalian internal secara efektif.

Perubahan signifikan lain pada kerangka versi baru ini terlihat dari fokus pada laporan yang diciptakan organisasi. Pada kerangka kerja versi baru, pelaporan kegiatan organisasi tidak hanya berfokus pada laporan keuangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek lain sehingga dalam kerangka ini, terdapat 4 tipe pelaporan yaitu keuangan internal, non-keuangan internal, keuangan eksternal, dan non-keuangan eksternal. Bersamaan dengan itu, kerangka baru juga memusatkan perhatian pada cara organisasi menghindari fraud.

Untuk memahami lebih lanjut perubahan dari versi 1992 ke versi tahun 2013, dapat dilihat dari ilustrasi kubus yang diberikan oleh COSO untuk tiap-tiap versinya:



Sumber gambar: COSO

Gambar di atas menunjukkan keterkaitan erat antara tujuan, komponen, dan struktur organisasi tempat diterapkannya pengendalian internal. Sisi atas kubus merepresentasikan tujuan, sisi depan merepresentasikan komponen, dan sisi samping kanan merepresentasikan ruang lingkup penerapan pengendalian internal. Terlihat dari gambar, lima komponen dari kerangka COSO masih sama untuk kedua versi, terdapat terdapat perbedaan prioritas atau susunan. Pada sisi tujuan dilakukannya pengendalian internal, terlihat bahwa aspek pelaporan mengalami perluasan fokus, tidak hanya pada finansial. Pada sisi ruang lingkup, versi baru lebih memperhatikan level-level yang lebih kecil/subordinat dari sebuah entitas/organisasi dan kepada fungsi masing-masing dan tidak lagi memperhatikan ruang lingkup aktivitas.

Alasan di Balik Pembaharuan Kerangka Kerja Pengendalian *Internal COSO* 2013

Beberapa hal yang mendorong diperbaharunya Kerangka Kerja Pengendalian *Internal COSO* 1992 menjadi versi terbarunya di 2013 adalah:

1. Lingkungan bisnis dan operasional berubah sangat cepat seiring pesatnya perkembangan teknologi. Lingkungan bisnis menjadi semakin kompleks, *technology driven*, dan mengglobal. Kerangka versi awal tidak akan bisa menyelesaikan solusi untuk masalah ini.
2. Ekspektasi yang besar terhadap tata kelola organisasi yang baik. Dalam versi sebelumnya, pembahasan tata kelola sangat minim bahkan tidak diperhatikan.
3. Pemangku kepentingan yang lebih terlibat sehingga mereka menginginkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam versi sebelumnya, tidak terlalu memperhatikan variabel pemangku kepentingan.
4. Meningkatnya ekspektasi akan penilaian risiko di semua aspek organisasi (keuangan, operasi, regulasi, IT).
5. Kompleksitas dalam undang-undang, peraturan, dan standar telah meningkat secara signifikan.
6. Telah terjadi kerusakan dalam skala besar terhadap tata kelola dan pengendalian internal dalam 20 tahun terakhir. Oleh karena itu, dibuat kerangka baru untuk dapat mencegah kerusakan yang lebih fatal.
7. Adanya ekspektasi yang besar terkait pencegahan dan deteksi *fraud* di setiap tingkatan.
8. Permintaan akan pelaporan internal dan eksternal yang update dan bermutu.

Manfaat Pengaplikasian Kerangka Kerja Pengendalian Internal *COSO* 2013

Bagi direksi dan dewan komisaris, kerangka kerja pengendalian *internal COSO* 2013, memberikan manfaat, antara lain:

1. Memudahkan penerapan pengendalian pada berbagai jenis entitas (perusahaan/instansi) sesuai struktur organisasi, pada setiap level entitas, unit operasi, atau fungsi.
2. Fleksibel dan memudahkan pengambilan keputusan dalam mendesain, mengimplementasikan, dan menerapkan pengendalian internal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip pada setiap level entitas, unit operasi, atau fungsi.
3. Membantu menilai efektivitas sistem pengendalian internal, mengetahui apakah komponen dan prinsip pengendalian internal sudah ada dan berfungsi di entitas serta apakah seluruh komponen beroperasi bersama.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko, dan mengembangkan pengelolaan respons atas risiko secara tepat sesuai tingkat risiko, dan lebih fokus pada pengukuran risiko terjadinya *fraud*.
5. Memberikan peluang mengembangkan aplikasi pengendalian internal baik untuk mencapai tujuan laporan keuangan, maupun laporan non-keuangan lainnya, baik operasional maupun menilai ketaatan pada peraturan dan kebijakan.
6. Memberikan peluang mengeliminasi ketidakefektifan, duplikasi, atau ketidakefisienan pengendalian, serta meminimalkan risiko yang akan menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Bagi pemangku kepentingan eksternal, penerapan kerangka kerja pengendalian *internal COSO* 2013, memberikan manfaat:

1. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan pada dewan komisaris dalam melakukan pengawasan atas sistem pengendalian internal.
2. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan akan tercapainya tujuan organisasi.
3. Memberikan kepercayaan atas kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko serta perubahan lingkungan bisnis dan operasi.
4. Meningkatkan pemahaman atas pemenuhan efektivitas sistem pengendalian internal.
5. Meningkatkan pemahaman bahwa kebijakan yang diambil manajemen telah tepat untuk meminimalkan ketidakefektifan, duplikasi, atau ketidakefisienan pengendalian.

Kesemua hal tadi membuat pemangku kepentingan lebih tenang dan dapat mempercayai organisasi dengan lebih baik.

Keterbatasan Pengendalian Internal menurut Kerangka Kerja Pengendalian *Internal COSO* 2013

Sebanyak apapun penerimaan organisasi di seluruh dunia atas kerangka *COSO*, *COSO* sendiri menyampaikan bahwa keberadaan pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan memadai dan bukan keyakinan mutlak. Berikut adalah keterbatasan pengendalian internal yang bisa saja terjadi karena:

- penetapan tujuan sebagai prasyarat pengendalian internal tidak atau kurang tepat;
- *human error* dalam pengambilan keputusan ataupun bias;
- *human error* dalam melaksanakan pengendalian;
- kemampuan atau pun peluang manajemen mengesampingkan pengendalian;
- kemampuan atau pun peluang manajemen, personil lain, atau pihak ketiga untuk berkolusi; peristiwa eksternal di luar kendali organisasi.

Untuk menyikapi keterbatasan ini, pihak dewan pengawas sebaiknya mengantisipasi peluang-peluang hal di atas terjadi dengan berbagai strategi.



BERISIK

BERBINCANG ASIK

soal Kebinekaan

BERISIK 2023



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Inspektorat Jenderal

BERISIK BERBINCAANG ASIK

soal Kebinekaan

Bandung, 14 Juli 2023



BERISIK 2023

PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM Mendukung PEKERJAAN AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH

Pada era dinamika informasi dan teknologi yang semakin maju, peran auditor internal pemerintah dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan dana publik yang efisien menjadi semakin penting. Auditor internal berfungsi sebagai garda terdepan dalam menilai sejauh mana instansi pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan dana dan tindakan yang tidak etis. Seiring perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), terbuka peluang baru untuk mengubah cara kerja dan pendekatan auditor internal pemerintah.

AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. AI mencakup berbagai teknik seperti machine learning, natural language processing, computer vision, dan pengolahan data besar (big data). Penerapan teknologi AI dalam berbagai sektor telah membawa perubahan yang signifikan, termasuk dalam bidang audit dan pengawasan internal pemerintah

Pentingnya Auditor Internal Pemerintah

Auditor internal pemerintah memiliki peran sentral dalam menciptakan tata kelola yang baik dalam pengelolaan sumber daya publik. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap kegiatan dan operasi pemerintah, mengidentifikasi pelanggaran atau penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Ini membantu mencegah pemborosan, penyalahgunaan dana, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, auditor internal pemerintah juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintah beroperasi sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Kegiatan audit internal yang efektif membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.

Tantangan dalam Pekerjaan Auditor Internal yang Membuat Mereka Membutuhkan AI

Meskipun peran auditor internal sangat penting, mereka juga dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjalankan tugas mereka. Pertama, lingkungan operasional yang kompleks dan terus berkembang memerlukan pendekatan audit yang lebih adaptif. Kedua, volume data yang semakin besar dan beragam mempersulit proses analisis yang manual. Ketiga, tuntutan untuk memberikan hasil audit dengan cepat sembari tetap mempertahankan kualitas dan akurasi menjadi suatu dilema. Belum lagi dengan tuntutan Reformasi Birokrasi, di mana nilai dari pelaksanaan RB setiap instansi negara harus lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yang artinya terdapat peningkatan pelayanan baik dari segi kualitas maupun kuantitas oleh sebuah instansi auditor internal pemerintah kepada para pemangku kepentingan, utamanya objek pemeriksaan/auditee.

Dalam konteks ini, AI menawarkan solusi potensial. Kemampuan AI dalam mengolah data besar dan mengidentifikasi pola-pola yang sulit diakses oleh metode tradisional dapat mengatasi tantangan tersebut. AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas analitis yang repetitif, memungkinkan auditor internal fokus pada analisis yang lebih mendalam dan strategis.

Peran Krusial Auditor Internal Pemerintah

Auditor internal pemerintah memiliki peran krusial dalam menjaga integritas, efisiensi, dan akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah. Peran ini membantu memastikan bahwa pemerintah menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Beberapa aspek kunci dari peran auditor internal pemerintah meliputi:

1. Pemeriksaan Independen dan Objektif

Auditor internal bertindak sebagai pihak independen yang tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan operasional. Kemandirian ini penting agar hasil audit dapat dianggap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pemeriksaan independen ini mencakup pengevaluasian efektivitas dan efisiensi program-program pemerintah serta mengidentifikasi potensi risiko.

2. Pemantauan dan Pengawasan

Auditor internal memiliki peran krusial dalam memonitor aktivitas pemerintah secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan diikuti dengan benar. Pengawasan ini membantu mencegah penyelewengan, korupsi, dan pelanggaran aturan yang dapat merugikan kepentingan publik.

3. Evaluasi Kinerja

Auditor internal membantu mengukur efektivitas program dan proyek pemerintah serta memberikan masukan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Evaluasi ini membantu pemerintah mengarahkan sumber daya dengan lebih bijak dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pemberian Rekomendasi Perbaikan

Setelah melakukan audit, auditor internal memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif untuk memperbaiki proses-proses dan mengatasi temuan yang diidentifikasi. Rekomendasi ini membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas-tugasnya.

5. Pencegahan Kecurangan dan Penyalahgunaan

Auditor internal berperan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan, penyalahgunaan dana, dan tindakan yang tidak etis. Dengan melakukan audit yang cermat, mereka membantu meminimalkan risiko-risiko tersebut serta memastikan penggunaan dana publik yang tepat.

6. Mendukung Pengambilan Keputusan

Hasil audit internal memberikan informasi yang berharga kepada manajemen dan pimpinan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Auditor internal membantu memastikan bahwa keputusan-keputusan ini didasarkan pada data yang akurat dan analisis yang mendalam.

7. Membangun Kepercayaan Masyarakat

Melalui pemeriksaan independen yang obyektif, auditor internal membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Dengan memberikan penilaian yang akurat, mereka membantu menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik.

Peran auditor internal pemerintah membentuk landasan penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pemerintahan. Dengan kemandiriannya, mereka memberikan pandangan yang obyektif terhadap kinerja pemerintah dan membantu menjaga integritas serta kepercayaan publik.

D. AI dalam Konteks Pemerintahan

Teknologi kecerdasan buatan/AI menciptakan transformasi besar dalam berbagai sektor, termasuk di dalamnya sektor pemerintahan. Penggunaan AI dalam konteks pemerintahan membawa perubahan fundamental dalam cara lembaga-lembaga publik beroperasi, berinteraksi dengan masyarakat, dan menjalankan tugas-tugasnya. Berikut adalah pemahaman mendalam tentang AI dan implikasinya dalam konteks pemerintahan:

1. Pengertian AI dan Jenis-jenisnya

AI merujuk pada kemampuan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pengambilan keputusan, dan pemrosesan bahasa alami. Jenis-jenis AI mencakup:

Machine Learning (Pembelajaran Mesin): Teknik yang memungkinkan mesin belajar dari data dan mengidentifikasi pola untuk membuat keputusan.

Natural Language Processing (Pemrosesan Bahasa Alami): Teknologi yang memungkinkan mesin memahami, menganalisis, dan merespons bahasa manusia.

Computer Vision (Penglihatan Komputer): Kemampuan mesin untuk memproses dan memahami informasi visual, seperti gambar dan video.

2. Transformasi Digital dalam Pemerintahan

Pemerintahan modern semakin mengadopsi konsep transformasi digital untuk meningkatkan layanan publik, efisiensi birokrasi, dan transparansi. Implementasi AI memainkan peran penting dalam transformasi ini. Penerapan AI dalam analisis data dan pengambilan keputusan telah menghasilkan wawasan yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas.

3. Manfaat AI dalam Konteks Pemerintahan

Penerapan teknologi AI dalam pemerintahan memiliki manfaat yang signifikan:

Pengolahan Data Cepat: AI dapat mengolah data besar dengan cepat dan akurat, memberikan wawasan yang mendalam kepada lembaga pemerintah.

Peningkatan Layanan Publik: AI dapat digunakan untuk mengembangkan layanan publik yang lebih responsif dan personal.

Analisis Kebutuhan Publik: AI dapat menganalisis data dan umpan balik masyarakat untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka.

Pemantauan dan Prediksi Risiko: AI dapat membantu dalam pemantauan risiko, memprediksi kemungkinan masalah, dan mengatasi potensi krisis.

4. Tantangan dalam Penerapan AI di Pemerintahan

Penggunaan AI dalam pemerintahan juga menghadapi tantangan:

Kekhawatiran Privasi dan Keamanan Data: Penggunaan AI memerlukan akses ke data yang sensitif, yang memunculkan kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data.

Keahlian Teknis: Integrasi dan penggunaan AI membutuhkan keahlian teknis yang mumpuni.

Etika dan Bias: Keputusan yang diambil oleh sistem AI dapat mencerminkan bias yang ada dalam data yang di-input atau data untuk melatih aplikasi AI, yang harus diatasi.

AI telah membawa transformasi dalam pemerintahan, memberikan potensi untuk meningkatkan efisiensi, layanan publik, dan analisis data. Namun, penerapan AI juga harus mengatasi berbagai tantangan, termasuk masalah privasi, keahlian teknis, dan kebijakan etika.

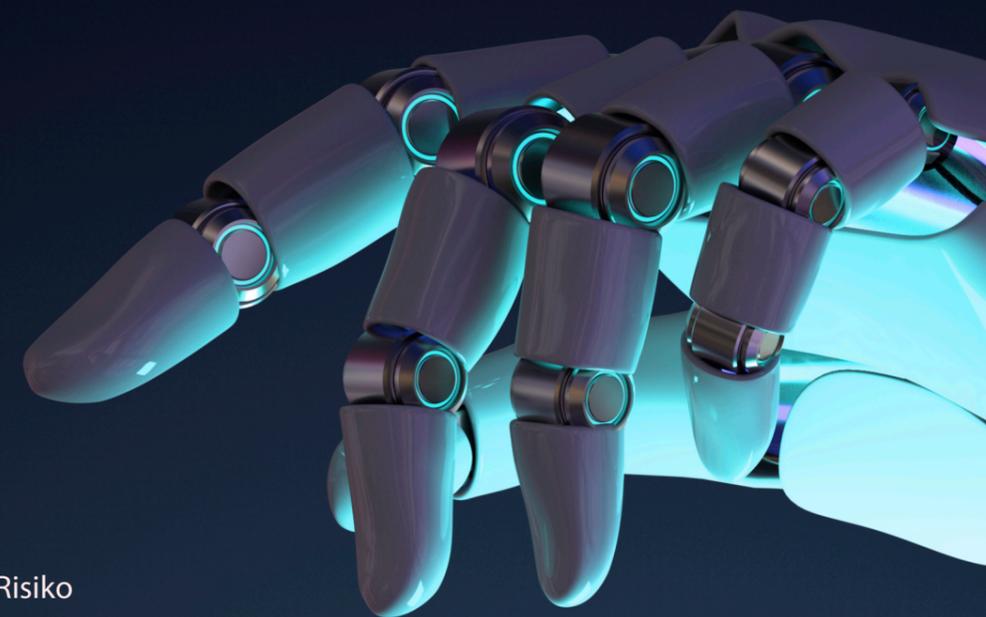
E. Penerapan AI dalam Pekerjaan Auditor Internal Pemerintah

Dalam dunia audit internal pemerintah yang semakin kompleks dan berubah, penggunaan teknologi AI membawa peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan dampak pekerjaan auditor. Penerapan AI dalam audit internal pemerintah membuka potensi untuk merubah cara tradisional audit dilakukan, dengan mengotomatisasi tugas-tugas tertentu dan memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang data. Berikut adalah beberapa cara penerapan AI dapat mendukung pekerjaan auditor internal pemerintah:

1. Analisis Data Otomatis

AI dapat menganalisis data secara otomatis dari berbagai sumber, mengidentifikasi pola-pola yang tidak terlihat secara manual. Ini memungkinkan auditor untuk menemukan anomali dan potensi kecurangan dengan lebih cepat dan akurat. Contohnya, AI dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan berdasarkan pola-pola yang tidak biasa.

Contoh aplikasi AI yang dapat dipakai untuk fungsi ini adalah *"IBM Watson Analytics"* (platform analisis data yang memanfaatkan AI untuk membantu pengguna dalam menggali wawasan dari data tanpa perlu memiliki latar belakang analisis yang mendalam), dan *"Tableau"*: (platform visualisasi data yang juga menggunakan teknik AI untuk memberikan rekomendasi visualisasi yang paling cocok untuk data yang dimasukkan.)



2. Pengujian Kepatuhan dan Risiko

Dengan bantuan AI, pengujian kepatuhan terhadap peraturan dan risiko dapat dilakukan dengan lebih menyeluruh dan efisien. AI dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan aturan atau pelanggaran potensial yang mungkin terlewatkan oleh audit manual.

Contoh aplikasi AI untuk fungsi ini adalah *"SAP Risk Management"*, yang memungkinkan pemanfaatan AI untuk mengidentifikasi risiko operasional dan kepatuhan terhadap peraturan. *"SAP Risk Management"* dapat membantu dalam mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan dalam data, serta memberikan rekomendasi tindakan yang diperlukan.

3. Deteksi Kecurangan dan Kecelakaan

AI dapat mendeteksi indikasi kecurangan atau penyelewengan dana melalui analisis pola perilaku dan transaksi. Kemampuan AI untuk memproses dan menganalisis data besar memungkinkan deteksi dini terhadap tindakan yang merugikan.

Contoh Aplikasi AI untuk fungsi ini adalah *"SAS Fraud Detection"*. Aplikasi ini menggunakan analisis data dan AI untuk mengidentifikasi pola-pola kecurangan dan aktivitas mencurigakan dalam berbagai sektor.

4. Pengembangan Model Prediksi dan Simulasi

Penerapan AI juga memungkinkan auditor untuk mengembangkan model prediksi dan simulasi yang membantu mengidentifikasi risiko masa depan. Misalnya, auditor dapat menggunakan AI untuk memprediksi potensi peningkatan biaya dalam program pemerintah atau perkiraan pendapatan di masa mendatang.

Contoh aplikasi AI untuk fungsi ini adalah *"AnyLogic"*. Platform ini memberikan simulasi yang menggunakan teknologi AI untuk mengembangkan model prediksi dan simulasi yang lebih canggih. Platform ini berguna untuk memprediksi hasil skenario berdasarkan berbagai variabel.

5. Efisiensi dalam Pelaporan Hasil Audit

Dengan otomatisasi sejumlah tugas analitis, auditor memiliki lebih banyak waktu untuk menganalisis temuan dan menyusun rekomendasi perbaikan. Hal ini memungkinkan proses pelaporan hasil audit menjadi lebih efisien dan akurat.

6. Integrasi dengan Profesionalisme Auditor

Meskipun AI dapat memberikan kemampuan analisis yang kuat, peran auditor dalam menginterpretasi hasil analisis dan memberikan wawasan kontekstual tetap penting. Integrasi antara AI dan keahlian profesionalisme auditor menciptakan kolaborasi yang kuat dan berdaya guna. Ingatlah, seberapa besar pun bantuan AI berdampak pada suatu pekerjaan, tetap dibutuhkan sentuhan manusia/human touch, yang memberikan ciri dan 'nyawa' pada pekerjaan tersebut.

Penerapan AI dalam pekerjaan auditor internal pemerintah membawa peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, mendeteksi risiko, dan memberikan wawasan yang lebih dalam. Namun, penting untuk diingat bahwa teknologi ini bukan pengganti peran manusia, tetapi alat yang dapat memperkuat dan mendukung kemampuan auditor.

F. Tantangan dan Pertimbangan Etika dalam Penerapan AI dalam Audit Internal Pemerintah

Meskipun penerapan teknologi AI dalam audit internal pemerintah membawa banyak manfaat, ada pula berbagai tantangan yang harus diatasi. Selain itu, pertimbangan etika yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan AI tetap sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma profesi auditor. Berikut adalah beberapa tantangan dan pertimbangan etika yang muncul:

1. Kekhawatiran Privasi dan Keamanan Data

Dalam menggunakan AI, auditor dapat mengakses data sensitif yang mencakup informasi pribadi dan rahasia. Tantangan ini memerlukan kebijakan yang ketat dalam mengelola dan melindungi data agar tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

2. Bias dan Diskriminasi dalam Data

Sistem AI dapat mencerminkan bias dalam data pelatihan yang digunakan untuk mengajar mesin. Jika data tersebut mengandung bias gender, ras, atau faktor lain, sistem AI dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif.

3. Kompleksitas Teknis dan Keahlian Auditor

Penerapan AI memerlukan pemahaman teknis yang mendalam, yang mungkin tidak dimiliki oleh semua auditor. Dibutuhkan kerjasama erat antara auditor dan ahli teknologi informasi untuk memastikan bahwa sistem AI diimplementasikan dengan benar.

4. Kepercayaan Publik

Penggunaan teknologi AI dapat menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran dari masyarakat yang meragukan keamanan dan kredibilitas proses audit. Membangun dan mempertahankan kepercayaan publik adalah tugas yang penting bagi auditor internal pemerintah.

5. Kontroversi Pengambilan Keputusan Manusia versus Mesin

Penerapan AI dalam audit internal pemerintah memicu pertanyaan tentang bagaimana keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI dibandingkan dengan keputusan yang dibuat oleh auditor manusia. Penting untuk memahami peran masing-masing dan bagaimana keduanya dapat berkolaborasi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, betapa powerful-nya sebuah aplikasi AI, tetap saja ia membutuhkan sentuhan manusia, terutama pada tahapan pengambilan keputusan. Contoh dari hal ini bisa dilihat pada tahap pemberian rekomendasi, bahwa yang memberikan rekomendasi hasil audit haruslah dari auditor yang memeriksa, dan bukan hasil yang diberikan dari aplikasi AI.

6. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan

Auditor internal pemerintah perlu menjalani pelatihan terus-menerus untuk memahami dan menguasai teknologi AI. Keterampilan ini mencakup analisis data, interpretasi hasil AI, dan pengambilan tindakan yang sesuai.

7. Ketergantungan pada Teknologi

Meskipun AI memiliki potensi besar, terlalu mengandalkan teknologi ini dapat mengaburkan kemampuan kritis dan analitis auditor. Penting untuk menjaga keseimbangan antara keterampilan manusia dan kekuatan AI.

Penerapan teknologi AI dalam audit internal pemerintah membawa tantangan dan pertimbangan etika yang perlu diatasi. Auditor harus bersikap proaktif dalam menghadapi kekhawatiran privasi, bias, kompleksitas teknis, dan kepercayaan publik. Pertimbangan etika dan kualitas profesionalisme juga menjadi poin kunci dalam memastikan bahwa penggunaan AI dalam audit internal pemerintah memberikan manfaat sebesar-besarnya tanpa mengorbankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh profesi auditor.

Romanti Sawitri, S.I.Kom., MBA

Formula Baru itu adalah Balai Pelestarian Kebudayaan



Langkah demi langkah perubahan dilakukan oleh Ditjen Kebudayaan untuk meningkatkan rasio ketercapaian tujuan organisasi. Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 183 tentang fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Di antara fungsi yang dijabarkan adalah pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan. Salah satu kebijakan yang sedang berproses adalah pembentukan Balai Pelestari Kebudayaan. Sebelum jauh membahas tentang Balai Pelestarian Kebudayaan, kita mengenal BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) dan BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya).

Kedua Balai tersebut melingkupi regional (dengan wilayah kerja 2 provinsi atau lebih) dan menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai nama platform masing-masing. BPCB dengan cagar budayanya, BPNB dengan segala nilai budayanya. Terdapat 12 BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) dan 11 BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya) yang kemudian menjadi 23 BPK (Balai Pelestarian Kebudayaan). Langkah besar yang dilakukan oleh Ditjen Kebudayaan sudah barang tentu selaras dengan risiko yang besar pula. Proses peleburan 2 perangkat menjadi satu ini tentunya tidak sederhana dan memiliki dampak yang tidak bisa dihindari. Pada beberapa satuan kerja, terjadi perampingan dalam organisasi, tetapi yang tentunya juga berdampak pada bertambahnya sasaran wilayah kerja dan ruang lingkup pekerjaannya. Selain itu ada juga penambahan satuan kerja baru yaitu:

NO	Nomenklatur	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai Pelestarian Kebudayaan Wil II	Medan	Provinsi Sumatera Utara
2	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV	Kota Tanjung Pinang	Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau
3	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VI	Kota Palembang	Provinsi Sumatera Selatan
4	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII	Kota Bengkulu	Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung
5	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIII	Kota Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan
6	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV	Kota Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara
7	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI	Kota Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
8	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVIII	Kota Palu	Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat
9	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI	Kota Ternate	Provinsi Maluku Utara
10	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXIII	Kabupaten Manokwari	Provinsi Papua Barat

Disadari bahwa proses reorganisasi memerlukan proses dan waktu, tetapi tentunya harus juga diimbangi dengan memperhatikan penyelesaian pencapaian target sesuai yang telah diamanatkan dalam regulasi.

Proses untuk mencapai target penyelesaian menjadi organisasi baru sampai benar-benar menjalankan tugas dan fungsi sesuai regulasi inilah yang menarik untuk dicermati oleh auditor, terutama auditor yang membidangi kebudayaan yang menjadi mitra kerja Ditjen Kebudayaan.

Reorganisasi adalah sesuatu yang wajar dalam tata kelola organisasi. Itu menunjukkan bahwa organisasi mampu mengevaluasi dan merumuskan langkah untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Reorganisasi pada Ditjen Kebudayaan dengan kehadiran Balai Pelestarian Kebudayaan patut diapresiasi dan dikawal dengan sebaik-baiknya. Mempersempit area/wilayah kerja secara sederhana menajamkan daya jelajah fungsional di UPT tersebut. Merentas jalan bagi setiap pamong yang sebelumnya berada dua atau tiga wilayah budaya kemudian fokus pada wilayah budaya saja. Contoh pada Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat. Sebelumnya ada BPCB Sumatera Barat dengan wilayah Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian ada juga BPNB Sumatera Barat dengan wilayah Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Lima provinsi yang sebelumnya menjadi wilayah kerja kedua satker tersebut disederhanakan menjadi satu provinsi saja, yaitu Sumatera Barat.

Selain dari area atau wilayah kerja, perubahan tersebut berdampak juga pada perubahan tugas dan fungsi. Tusi BPCB dan BPNB yang semula mengacu pada Permendikbud No 26 Tahun 2020 pasal 44, 45, 49, dan 50:

Tugas BPCB: Melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya	
Fungsi BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya):	
1	Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
2	Pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
3	Pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
4	Pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
5	Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
6	Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
7	Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
8	Pelaksanaan urusan ketatausahaan
Tugas BPNB: Melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerjanya	
Fungsi BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya):	
1	Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
2	Pelaksanaan perlindungan terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
3	Pelaksanaan pengembangan terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
4	Pelaksanaan pemanfaatan terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
5	Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
6	Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
7	Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; dan
8	Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Tugas BPK: Melaksanakan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	
Fungsi BPK (Balai Pelestarian Kebudayaan):	
1	Pelaksanaan perlindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
2	Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
3	Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
4	Pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
5	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
6	Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam reorganisasi adalah: tujuan/strategi organisasi, analisis sumber daya, analisis sarana/prasarana, adaptasi/inovasi dan kepemimpinan. Kajian demi kajian, simulasi demi simulasi dilakukan untuk menciptakan rumusan reorganisasi. Dalam konteks pengawasan, titik rawan reorganisasi terdapat pada penyesuaian pada tahun berjalan. Mengacu pada Permendikbudristek Nomor 33 Tahun 2022, pada pasal 3 dan 4 terkait tugas dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan. Terdapat 3 objek yang menjadi fokus Balai Pelestarian Kebudayaan: Cagar Budaya, Objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan. Menarik untuk diperdalam.

Objek Pemajuan Kebudayaan, tiga kata baru yang memperluas dan memperjelas target Balai Pelestarian Kebudayaan selain Cagar Budaya. Dalam UU Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 disebutkan tindakan yang dilakukan terhadap objek pemajuan kebudayaan yakni inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan. Objek pemajuan kebudayaan tersebut antara lain: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional. Kemendikbudristek secara perlahan harus menyesuaikan langkah, menyamakan irama dengan UU Pemajuan Kebudayaan tentunya. Apakah Balai Pelestarian Kebudayaan adalah formula yang tepat untuk menyesuaikan langkah dan menyamakan irama? Pertanyaan itu akan dijawab dengan proses teknis reorganisasi yang tengah berjalan.

Potensi risiko yang akan timbul dari reorganisasi ini secara umum adalah belum siapnya manajemen dan satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan nomenklatur yang baru ditinjau dari aspek Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Keuangan, dan aspek yang lain yang dapat menghambat proses pencapaian target sesuai yang diharapkan.

Dalam proses itu Inspektorat Jenderal yang memiliki fungsi pengawasan intern perlu untuk ikut andil dalam melakukan pengawasan atas proses penyesuaian, perpindahan dari BPCB-BPNB menjadi BPK (Balai Pelestarian Kebudayaan) ditinjau dari berbagai aspek.

Peran pengawasan intern dari Inpektorat Jenderal Kemendikbudristek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam mengambil langkah perbaikan apabila ditemukan hal-hal yang menjadi kendala yang menghambat proses pencapaian target yang telah diamanahkan dalam regulasi.

Awalul Ikhwan, S.S. dan Asep Suryamiharja, S.S.





Waspada Infeksi Menular Seksual yang Merajalela

dr. Ida Ayu Made Niki Putri Ashrita

Kita mungkin sudah sering mendengar istilah penyakit menular seksual (PMS) atau infeksi menular seksual (IMS). Penyakit ini umumnya diperoleh melalui kontak seksual. Bakteri, virus, atau parasit yang menyebabkan IMS dapat berpindah dari orang ke orang melalui darah, air mani, atau cairan vagina dan cairan tubuh lainnya. Terkadang infeksi ini dapat ditularkan secara nonseksual, seperti dari ibu ke bayinya selama kehamilan atau persalinan, dan melalui transfusi darah atau penggunaan jarum suntik bersama. Infeksi menular seksual tidak selalu menimbulkan gejala. Kemungkinan untuk tertular IMS dari orang yang tampaknya sangat sehat dan bahkan mungkin tidak tahu bahwa mereka terinfeksi justru memiliki potensi meningkatkan risiko penularan.

Kenaikan kasus HIV- dan sifilis yang terjadi di Indonesia cukup membuat kita perlu waspada mengenai penyakit infeksi menular seksual.

Terlebih adanya pergeseran tren penyakit ini ke usia yang semakin muda dan dengan mayoritas yang terjadi pada ibu rumah tangga. Beberapa jenis penyakit yang termasuk IMS adalah sifilis, gonore atau raja singa, trikomonas, klamidia, herpes genital, chancroid, dan HIV/AIDS.

Orang-orang yang berisiko tinggi tertular IMS adalah kelompok homoseksual (baik laki suka laki (LSL) atau perempuan suka perempuan (PSP), orang yang berhubungan seksual tidak menggunakan pengaman, dan memiliki lebih dari satu pasangan dalam kurun waktu 1 bulan (untuk laki-laki) atau 3 bulan (untuk perempuan).

Hasil Estimasi IMS oleh Kementerian Kesehatan, di Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan prevalensi gonore dan infeksi klamidia pada orang risiko tinggi 30 kali lebih tinggi dibandingkan pada populasi umum.

Berdasarkan infeksi penyebab, IMS dapat menimbulkan gejala yang perlu kita waspadai dan harus diperiksa ke dokter apabila Anda atau pasangan memiliki perilaku risiko tinggi dengan gejala di bawah ini.

1. Keputihan yang abnormal;

Pada beberapa keadaan, keputihan dapat menjadi hal yang normal seperti menjelang haid, kelelahan, atau terlalu sering menggunakan pembersih vagina. Namun, apabila keputihan banyak, berwarna kuning atau kelabu, berbau tidak sedap, dan terasa panas, Anda patut curiga terjadi infeksi yang kemungkinan disebabkan oleh salah satu penyakit IMS.

2. Kutil Kelamin;

Kutil biasanya disebabkan oleh infeksi virus Human Papiloma Virus (HPV) dan dapat tumbuh di mana saja pada tubuh kita. Meskipun begitu, lokasi kutil yang terdapat di bagian intim dan/atau anus, terlebih jika jumlahnya yang banyak, dapat menjadi kecurigaan besar bahwa infeksi ini ditularkan saat berhubungan seksual. Banyak mitos yang salah dan menganggap kutil di area kelamin dapat disembuhkan dengan cara alami atau hilang sendiri, tetapi hal ini tidak benar. Infeksi HPV juga memiliki risiko untuk berkembang menjadi keganasan baik pada laki-laki maupun perempuan.



3. Nyeri atau panas saat berkemih;

Sebagian besar gejala kencing yang nyeri dan panas dialami oleh kaum hawa yang terinfeksi IMS seperti gonore atau raja singa. Selain kencing terasa panas, biasanya laki-laki dengan infeksi gonore juga mengeluh keluar cairan dari penis.

4. Luka di kelamin

Luka pada daerah kelamin baik yang terasa nyeri ataupun tidak nyeri dan tidak didahului trauma sebelumnya merupakan salah satu ciri-ciri IMS yang sering dijumpai. Pada luka yang tidak nyeri biasanya akan mudah terabaikan oleh penderita, tetapi ini justru membuat kita perlu waspada karena luka yang tidak nyeri merupakan salah satu gejala dari infeksi sifilis.

Meskipun awalnya tampak sembuh sendiri, parasit penyebab penyakit sifilis ini tetap mendiami tubuh kita dan siap bermanifestasi menjadi gejala lain seperti ruam kulit, rambut rontok, bengkak pada kelenjar limfa, dan benjolan basah warna pucat yang nyeri di area lembab seperti kelamin yang sangat menular.

Apabila anda atau pasangan anda memiliki salah satu gejala di atas, ada baiknya untuk segera memeriksakan ke dokter untuk memastikan bahwa gejala yang dimiliki merupakan salah satu penyakit infeksi menular seksual atau bukan sehingga dapat dilakukan penanganan seperti pemberian antibiotik atau anti-virus secara tepat.

Hal yang paling dikhawatirkan adalah apabila infeksi ini menyerang ibu hamil, penyakit ini berisiko menyebabkan kecacatan pada bayi atau bahkan kematian janin dalam kandungan. IMS juga meningkatkan risiko terjadinya infeksi HIV yang seperti kita ketahui sampai saat ini belum ada obatnya.

Untuk mencegah penularan IMS, hal utama yang harus dilakukan adalah penggunaan kondom saat melakukan hubungan yang berisiko tinggi. Hindari juga berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Vaksin yang tersedia saat ini hanya untuk melindungi dari infeksi HPV yang berisiko menjadi kanker serviks bagi kaum perempuan, dan tidak memberikan perlindungan untuk IMS jenis lainnya.



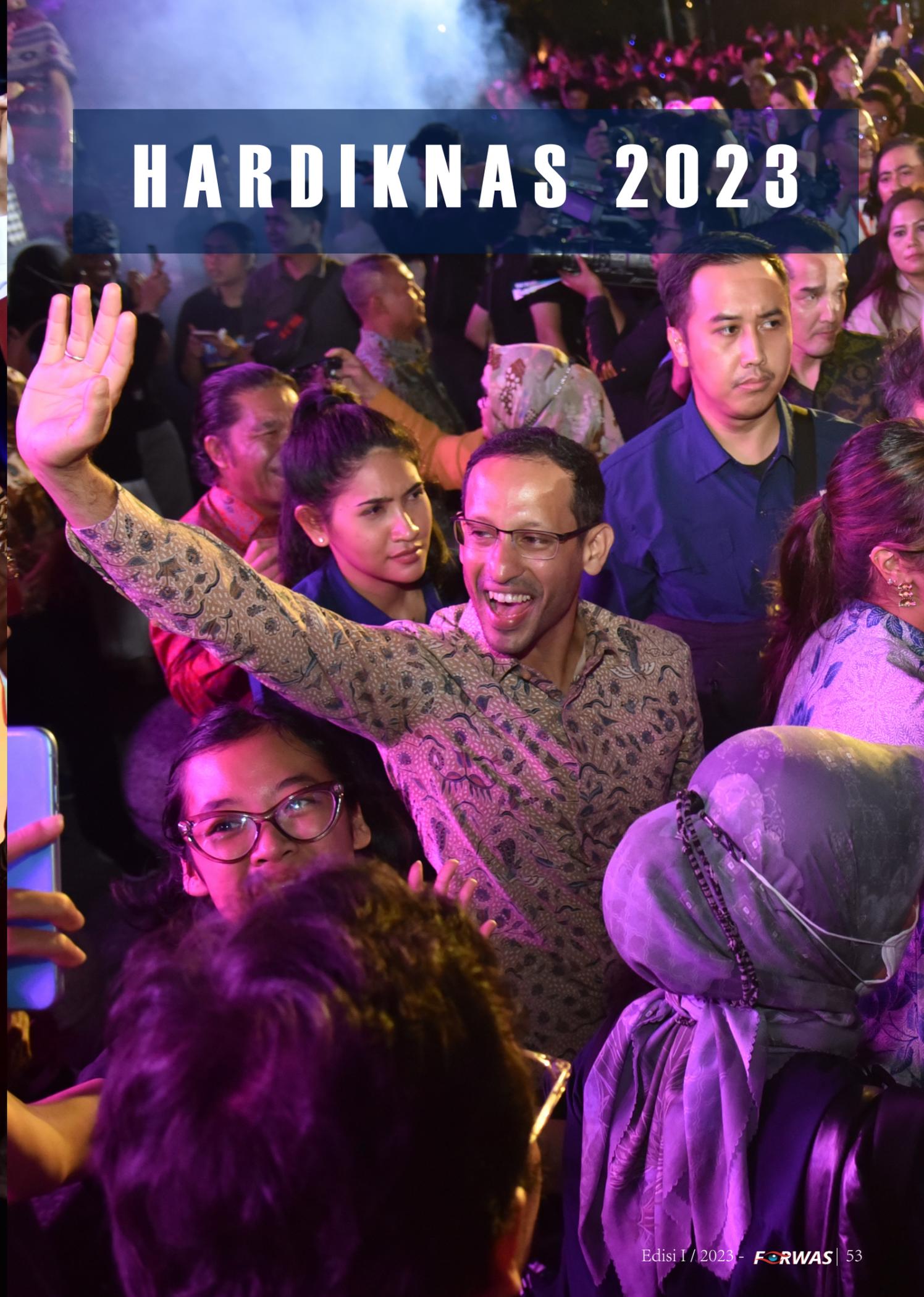
KARNAVAL PUNCAK HARDIKNAS 2023



KARNAVAL PUNCAK



HARDIKNAS 2023



“Pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas, bukan hanya guru, tetapi juga orang tua, dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat.”



Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim